

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perekonomian Indonesia sangat bergantung pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang terbukti menjadi tulang punggung ketahanan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2023, UMKM menyumbang 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hingga 97% tenaga kerja nasional. UMKM juga memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Dalam mendukung keberlangsungan UMKM, lembaga keuangan mikro seperti koperasi dan Unit Simpan Pinjam (USP) memegang peranan strategis, terutama dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih inklusif dan efisien.

Kepercayaan menjadi fondasi utama dalam keberlangsungan koperasi. Tanpa kepercayaan, interaksi antar anggota dan pengurus tidak akan berjalan dengan baik. (Hamdani & Lupiyoadi, 2009) menyebutkan bahwa kepercayaan konsumen terhadap suatu organisasi tumbuh dari konsistensi kualitas layanan, reputasi, dan integritas organisasi tersebut. Menurut (Anderson & Narus, 1990), kepercayaan adalah keinginan untuk bergantung pada partner kerjasama yang telah diyakini.

Kepercayaan merupakan keyakinan pada pihak yang mendapat kepercayaan adalah reliabel dan integritas tinggi, disertai dengan kualitas yang konsisten, kompeten, jujur, bertanggungjawab dan baik. Kepercayaan konsumen tidak hadir begitu saja, tetapi dari proses yang lama sampai kedua belah pihak saling mempercayai. Dalam proses terbentuknya kepercayaan konsumen dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti, reputasi organisasi, besar atau kecilnya organisasi, saling menyenangkan antara konsumen dengan organisasi maupun antara konsumen dengan karyawan organisasi (Fadilah 2012).

Menurut (Tresnawati & Rahayu, 2023), transparansi dalam pelaporan keuangan koperasi sangat krusial dalam membentuk kepercayaan publik, terutama di lingkungan lembaga keuangan milik anggota. Keterbukaan informasi, penyampaian laporan secara tepat waktu, serta aksesibilitas data menjadi elemen penting dalam membangun iklim kepercayaan. Transparansi laporan keuangan berperan penting dalam membentuk kepercayaan anggota koperasi. (Herlina, 2018) menyatakan bahwa transparansi mencakup penyampaian informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses. Yuliafitri dan Khoiriyah (2016) menambahkan bahwa indikator transparansi meliputi penyediaan laporan tepat waktu, keterbukaan informasi pengelolaan koperasi, dan dokumentasi kebijakan secara tertulis.

Sementara itu, (Muharram, 2023) mengungkapkan bahwa meskipun akuntabilitas secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan, namun secara simultan, akuntabilitas dan transparansi berkontribusi dalam menciptakan kepercayaan anggota. Bahkan, (Athifah et al., 2018) menekankan pentingnya transparansi sebagai jawab yang jelas, pelaporan berkala, sistem evaluasi kinerja, serta audit eksternal oleh lembaga independen. Dalam konteks koperasi, akuntabilitas bukan hanya menyangkut keuangan, tetapi juga nilai moral berupa kejujuran dan kepedulian terhadap bentuk pertanggungjawaban moral yang berdampak besar terhadap kredibilitas lembaga, terutama dalam sektor nirlaba seperti koperasi sosial. Hal ini diperkuat oleh Yuliafitri (2016) yang menyebutkan bahwa akuntabilitas mencakup fungsi dan tanggung anggota.

Di Indonesia sendiri, reformasi pengelolaan keuangan telah memasuki era transparansi dan akuntabilitas publik. Hal tersebut dapat dilihat dari regulasi Pemerintah yang tertulis dalam beberapa undang-undang, di antaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Transparansi dan akuntabilitas, kualitas laporan keuangan dapat dinilai melalui proses penyusunan dan penyajian laporan yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi instrumen penting

dalam pelaporan keuangan, terutama untuk membangun kepercayaan anggota terhadap pengelolaan dana. Oleh karena itu, dalam pengelolaan dana publik, akuntabilitas sangat diperlukan untuk memastikan adanya tanggung jawab, sementara transparansi penting untuk menjamin keterbukaan informasi yang dapat dipercaya oleh para pemangku kepentingan (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan konsistensi pentingnya dua variabel ini. (Tresnawati & Rahayu, 2023) menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan anggota koperasi. Penelitian (Muharram, 2023) memperlihatkan bahwa meskipun akuntabilitas secara parsial tidak signifikan, namun secara bersama-sama dengan transparansi tetap berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan. Demikian pula, (Athifah et al., 2018) menekankan bahwa dalam lembaga sosial, transparansi lebih berpengaruh dibandingkan akuntabilitas secara individual.

Di tingkat daerah, khususnya di Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Rupert merupakan salah satu wilayah dengan potensi ekonomi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil. Dalam rangka mendukung kebutuhan modal dan simpanan masyarakat, di Kecamatan Rupert terdapat 12 Unit Simpan Pinjam (USP) yang tersebar di berbagai desa. USP ini seharusnya menjadi jembatan akses keuangan bagi masyarakat pedesaan. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan adanya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Unit Simpan Pinjam (USP).

Berdasarkan laporan tahunan dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis tahun 2024, dari 12 USP yang tercatat aktif di Kecamatan Rupert, hanya 4 USP yang menunjukkan kinerja sehat dengan tingkat partisipasi anggota dan pencapaian target pinjaman yang tinggi. Sebaliknya, 8 USP lainnya mengalami stagnasi bahkan penurunan drastis dalam volume simpanan dan jumlah anggota aktif. Masalah klasik yang sering muncul adalah kurangnya transparansi pengurus dalam menyampaikan laporan keuangan serta tidak adanya mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional Unit Simpan Pinjam di Kecamatan Rupert. Beberapa anggota mengaku tidak mendapatkan akses informasi terkait penggunaan, laporan keuangan yang tidak dipublikasikan secara rutin, serta lemahnya komunikasi antara pengurus dan anggota. Hal ini berpotensi menimbulkan distrust (ketidakpercayaan), bahkan konflik internal yang dapat melemahkan semangat koperasi sebagai badan usaha berbasis keanggotaan.

Meskipun beberapa penelitian telah membuktikan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam lembaga keuangan mikro, namun belum ada kajian empiris yang secara spesifik dilakukan di Kecamatan Rupert dengan fokus pada Unit Simpan Pinjam. Penelitian yang ada cenderung bersifat makro atau mengambil objek di wilayah perkotaan atau kabupaten besar. Hal ini menunjukkan adanya research gap yang cukup signifikan, terutama untuk wilayah dengan karakteristik sosial-ekonomi desa yang sangat berbeda. Namun, belum ada penelitian spesifik yang mengkaji pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kepercayaan anggota Unit Simpan Pinjam di Kecamatan Rupert. Padahal, karakteristik sosial ekonomi pedesaan, hubungan emosional antara anggota, dan kompleksitas pengelolaan koperasi di wilayah terpencil memerlukan pendekatan lokal yang khas.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas terhadap kepercayaan anggota Unit Simpan Pinjam di Kecamatan Rupert. Kajian ini berlandaskan pada teori kepercayaan organisasi dan prinsip tata kelola koperasi yang baik (good governance), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran (Hediono & Prasetyaningsih, 2019).

Oleh karena itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, teknik pengambilan sampel sampling jenuh, dan analisis data regresi linier berganda. Penelitian ini akan merancang model pengelolaan Unit Simpan Pinjam yang berbasis pada prinsip transparansi dan akuntabilitas yang aplikatif dan partisipatif. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan kebijakan dan strategi penguatan kelembagaan Unit Simpan Pinjam yang lebih kredibel, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat.

Adapun jumlah keseluruhan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Keseluruhan Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert

NO	Desa/Kelurahan	Nama USP
1	Desa Teluk Lecah	Teluk Lecah Mandiri
2	Desa Sri Tanjung	Mekar Jaya
3	Desa Sei Cingam	Cingam Jaya
4	Desa Pangkalan Nyirih	Maju Bersama
5	Desa Pancur Jaya	Pancur Mandiri
6	Desa Pangkalan Pinang	Maju Mandiri
7	Desa Hutan Panjang	Berdikari
8	Desa Dungun Baru	Karya Lestari
9	Desa Makeruh	Karya Bersama
10	Desa Parit Kebumen	Artha Graha
11	Desa Sukarjo Mesim	Karsini Mandiri
12	Desa Darul Aman	Satu Hati

Sumber: Jumlah Keseluruhan USP di Kecamatan Rupert

Pada tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat 12 Unit Simpan Pinjam (USP) yang tersebar di berbagai desa di Kecamatan Rupert. Keberadaan USP ini seharusnya mampu memperluas akses layanan keuangan mikro bagi masyarakat pedesaan. Namun, meskipun jumlahnya cukup banyak, tidak semua USP berada dalam kondisi kinerja yang sehat, sehingga menjadi dasar pentingnya dilakukan penelitian terkait transparansi, akuntabilitas, dan tingkat kepercayaan anggota terhadap pengelolaan USP.

Dengan latar belakang ini, penelitian tidak hanya berkontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu akuntansi dan manajemen koperasi, tetapi juga secara praktis dalam memperkuat eksistensi Unit Simpan Pinjam sebagai institusi keuangan mikro yang berdaya saing di tingkat desa, khususnya di Kecamatan Rupert. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas Terhadap Kepercayaan Publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert?
3. Apakah transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam di Kecamatan Rupert?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak penelitian capai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan dan Akuntabilitas terhadap Kepercayaan Publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert baik secara teoretis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi dan manajemen keuangan koperasi, dengan menambah wawasan mengenai pentingnya transparansi dan

akuntabilitas dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan mikro seperti Unit Simpan Pinjam (USP).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Unit Simpan Pinjam (USP) di Kecamatan Rupert:
Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas tata kelola koperasi, khususnya dalam hal transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan, guna memperkuat kepercayaan publik.
- b. Bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis
Penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa serta sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah atau Dinas Terkait:
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi di daerah, khususnya di wilayah pedesaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi khususnya pada mahasiswa Program Studi Akuntansi Keuangan Publik ataupun mahasiswa lainnya dalam melakukan penelitian.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada analisis mengenai pengaruh transparansi laporan keuangan dan akuntabilitas terhadap kepercayaan publik pada Unit Simpan Pinjam (USP) yang berada di Kecamatan Rupert, Kabupaten Bengkalis. Penelitian mengkaji persepsi terhadap dua variabel independen, yaitu transparansi dan akuntabilitas, serta variabel dependen berupa tingkat kepercayaan publik. Data yang digunakan diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner dengan responden yang merupakan anggota aktif USP.